



PROVINSI SUMATERA SELATAN

BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian kewajiban daerah yang belum dapat dilaksanakan, sehingga perlu diatur proses penyelesaiannya agar terwujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Huruf T Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran dan Bab VI Huruf D angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muara Enim.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD Kabupaten Muara Enim.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidi, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu Program/Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
21. Belanja yang melampaui tahun anggaran adalah belanja yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan/

pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran yang dapat terjadi akibat keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan atau akibat dari adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa atau akibat dari adanya keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan atau kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. jenis belanja yang melampaui tahun anggaran; dan
- b. tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

BAB III

JENIS BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 3

Belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- d. kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan tahapan pokok sebagai berikut:

- a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
- c. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 5

Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan tahapan pokok sebagai berikut:

- a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan

- c. mengesahkan perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dengan tahapan pokok sebagai berikut:

- a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna anggaran/pengguna barang dan jasa;
- b. Bupati menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- d. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
- e. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 7

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan dengan tahapan pokok sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
- b. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk

selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- c. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
- d. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Bagian Kedua

Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan yang telah diselesaikan 100% ke Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan kepada APIP untuk direviu.
- b. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. dokumen kelengkapan pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - 3. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. berita acara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 7. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 10. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 12. potongan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Jamsostek) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. khusus untuk pekerjaan konsultansi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. berdasarkan penugasan dari Bupati, APIP melakukan reviu atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melakukan penelitian

administrasi dan penelitian lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. hasil rewiu APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- f. hasil rewiu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- g. berdasarkan hasil rewiu APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- h. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf g dengan jumlah anggaran mempedomani hasil rewiu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- i. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h kepada TAPD.
- j. berdasarkan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf i, TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk menampung pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf a dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- k. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf j diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- l. berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf j, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf i.
- m. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
- n. kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA-SKPD menjadi DPA SKPD.
- o. kepala BPKAD menyampaikan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf n kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan.
- p. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf p disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- r. Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf q, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100% sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf q, Kepala SKPD memerintah PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima Pihak Ketiga.
- t. bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD berdasarkan :

1. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 2. hasil rewiu APIP;
 3. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf j;
 4. DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD;
 5. fotokopi rekening bank Pihak Ketiga yang masih aktif; dan
 6. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- u. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf t dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD, PPK SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- v. setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf u, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer dana Pihak Ketiga ke nomor rekening bank Pihak Ketiga.
- w. penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf t, huruf u, dan huruf v dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa kepada Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan kepada APIP untuk direwiu.

- b. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan revidi atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. dokumen kelengkapan atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - 3. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. berita acara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 7. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;

10. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 12. potongan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial /Jamsostek) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. khusus untuk pekerjaan konsultansi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. berdasarkan penugasan dari Bupati, APIP melakukan reviu atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. hasil reviu APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
 - f. hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
 - g. berdasarkan hasil reviu APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- h. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan jumlah anggaran mempedomani hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- i. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD kepada TAPD atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h.
- j. berdasarkan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf i, TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk menampung pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf i dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- k. peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf j diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- l. berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf j, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan

DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf i.

- m. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
- n. kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA-SKPD menjadi DPA SKPD.
- o. kepala BPKAD menyampaikan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf n kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan.
- p. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf p disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- r. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf q, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- y. berdasarkan SPD, sebagaimana dimaksud pada huruf q, kepala SKPD memerintah PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima Pihak Ketiga.

- z. bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD berdasarkan:
 - 1) dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 2) hasil reuiu APIP;
 - 3) Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf k;
 - 4) DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD;
 - 5) fotokopi rekening bank Pihak Ketiga yang masih aktif; dan
 - 6) dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- aa. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf z dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD, PPK SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- bb. setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf aa, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer dana Pihak Ketiga ke nomor rekening bank Pihak Ketiga.
- cc. penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf z, huruf aa, dan huruf bb dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melakukan penelitian atas sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*).

- b. dalam hal hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengindikasikan bahwa keterlambatan pekerjaan/pembayaran terjadi karena keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*), Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati Cq. APIP.
- c. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan evaluasi atas hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. hasil evaluasi APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- e. dalam hal hasil evaluasi APIP sebagaimana dimaksud pada huruf d berupa keterlambatan pekerjaan pekerjaan/pembayaran terjadi karena keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*), APIP memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan keadaan kahar (*force majeure*).
- f. Bupati menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. berdasarkan keputusan Bupati tentang keadaan kahar (*force majeure*), Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) ke Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan kepada APIP untuk direviu.
- h. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf g.
- i. dokumen kelengkapan pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*)

sebagaimana dimaksud pada huruf g sekurang-kurangnya terdiri atas :

1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
2. berita acara penyelesaian pekerjaan;
3. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. berita acara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
7. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
10. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
12. potongan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial/Jamsostek) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. khusus untuk pekerjaan konsultansi yang perhitungannya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. berdasarkan penugasan dari Bupati, APIP melakukan reviu atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf g dengan melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. hasil reviu APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- l. hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf k menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- m. berdasarkan hasil reviu APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf g.
- n. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana

dimaksud pada huruf m dengan jumlah anggaran mempedomani hasil revid APIP sebagaimana dimaksud pada huruf l.

- o. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf n kepada TAPD.
- p. berdasarkan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf o, TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk menampung pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf o dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- q. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf p diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- r. berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf q, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf q.
- s. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa

- termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf r kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
- t. Kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA-SKPD menjadi DPA SKPD.
 - u. Kepala BPKAD menyampaikan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf t kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan.
 - v. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - w. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf v disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
 - x. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf w, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran atas pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - y. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf w, Kepala SKPD memerintah PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima Pihak Ketiga.
 - z. Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD berdasarkan:
 - 1. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf i;
 - 2. hasil reuiu APIP;
 - 3. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf q;
 - 4. DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD;
 - 5. fotokopi rekening bank Pihak Ketiga yang masih aktif;dan

6. Dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - aa. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf z dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD, PPK SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD.
 - bb. setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf aa, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer dana Pihak Ketiga ke nomor rekening bank Pihak Ketiga.
 - cc. penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf z, huruf aa, dan huruf bb dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melakukan penelitian atas dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD.
- b. dalam melakukan penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat melibatkan unsur SKPD teknis terkait.
- c. dalam hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengindikasikan bahwa kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan layak untuk dilakukan pembayaran, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati Cq. APIP.
- d. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan evaluasi atas hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. berdasarkan penugasan dari Bupati, APIP melakukan evaluasi atas hasil penelitian Kepala SKPD selaku Pengguna

Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. dalam melaksanakan evaluasi APIP sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat melibatkan unsur SKPD teknis terkait dan instansi Pemerintah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. hasil evaluasi APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- h. dalam hal hasil evaluasi APIP sebagaimana dimaksud pada huruf g berupa kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, APIP memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan hal berkenaan tersebut sebagai kewajiban Pemerintah Kabupaten.
- i. Bupati menetapkan hal berkenaan tersebut sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf i, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan dokumen pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ke Bupati Cq. TAPD untuk diteruskan APIP untuk direviu.
- k. Bupati menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf j.
- l. Dokumen kelengkapan atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf j sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2. salinan hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap (apabila kewajiban pemerintah akibat dari keputusan pengadilan);

3. Dokumen yang terkait yang menjadi dasar timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah antara lain:
- a) berita acara penyelesaian pekerjaan; dan/atau
 - b) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c) surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) berita acara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e) kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan/atau
 - f) surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h) surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; dan/atau
 - i) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- j) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; dan/atau
 - k) potongan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial /Jamsostek) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - l) khusus untuk pekerjaan konsultasi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. berdasarkan penugasan dari Bupati, APIP melakukan reuiu atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf k sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. hasil reuiu APIP disampaikan kepada Bupati Cq. TAPD dengan tembusan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
 - o. hasil reuiu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf n menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan penganggarnya dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
 - p. berdasarkan hasil reuiu APIP, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf o.

- q. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan atas kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf p dengan jumlah anggaran mempedomani hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud pada huruf o.
- r. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf q kepada TAPD.
- s. berdasarkan RKA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf p, TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf r dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- t. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf s diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dalam hal tidak ada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- u. berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf t, Ketua TAPD atas nama Bupati menugaskan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf t.
- v. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada huruf u kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.

- w. kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mengesahkan rancangan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD menjadi DPA SKPD.
- x. kepala BPKAD menyampaikan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf w kepada Sekretaris Daerah untuk meminta persetujuan.
- y. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menerbitkan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- z. SPD yang telah diterbitkan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf y disampaikan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- aa. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf z, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pembayaran atas kewajiban Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- bb. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf z, Kepala SKPD memerintah PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima Pihak Ketiga.
- cc. Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD berdasarkan:
 - 1. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf l;
 - 2. hasil revidi APIP;
 - 3. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf t;
 - 4. DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD;
 - 5. fotokopi rekening bank Pihak Ketiga yang masih aktif; dan
 - 6. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- dd. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf cc dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD, PPK SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- ee. setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf dd, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan selanjutnya mentransfer dana Pihak Ketiga ke nomor rekening bank Pihak Ketiga.
- ff. penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf cc, huruf dd, dan huruf ee dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Mei 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

Dr. H. NASRUN UMAR, SH., M.M.

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
SKPD :
Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan/Sub Kegiatan yang terkait dengan penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran atas belanja yang melampaui tahun anggaran yang disebabkan karena: *)
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan*) atau
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa*) atau
 - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan*) atau
 - d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap. *)
2. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/daerah, saya bersedia menyetorkan seluruh kerugian negara/daerah tersebut ke Kas Negara/Kas Daerah.
3. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan atas pernyataan ini maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Muara Enim, 20....

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran*)

Materai
Cukup

.....
NIP

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

Dr. H. NASRUN UMAR, SH., M.M.

*) sesuai peruntukannya